

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah pondasi yang menopang kehidupan masyarakat di suatu negara. Pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ternyata justru menghasilkan sebuah fenomena eksklusi sosial serta memunculkan krisis besar berupa kemiskinan, kekerasan, serta kehancuran lingkungan (Warsilah, 2016:33). Kondisi tersebut tentu harus diantisipasi oleh Indonesia dengan mengimplementasikan paradigma pembangunan baru yang memiliki fokus tinggi pada isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat selain fokus utamanya pada sektor ekonomi. paradigma pembangunan tersebut disebut dengan pembangunan inklusif yang memiliki tujuan untuk menjamin masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun.

Pembangunan inklusif muncul karena adanya komitmen untuk mengikutsertakan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan sehingga diharapkan akan menghasilkan manfaat yang persebarannya lebih luas. Pembangunan inklusif tercipta sebagai respon atas pembangunan yang menuntut pertumbuhan sebagai upaya pemerataan pembangunan tidak semata hanya kepada kelompok-kelompok eksklusif, sehingga memberikan akses luas kepada seluruh elemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan termasuk di dalamnya infrastruktur dan layanan dasar. Penciptaan

lapangan kerja yang produktif serta menguntungkan merupakan strategi utama yang dimiliki oleh pembangunan inklusif. Aspek sosial yang diperhatikan tercermin dari jaminan penyediaan pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau sedikit mendapatkan manfaat dari pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dihadirkan melalui peningkatan pelayanan publik serta dukungan kebijakan publik yang memadai.

Perwujudan pembangunan inklusif dapat dilaksanakan melalui kolaborasi bersama pemerintah dengan mengadopsi pendekatan inklusif seperti partisipasi, non diskriminasi, dan akuntabilitas pada perumusan kebijakan dengan mengikutsertakan seluruh pihak yang memiliki kepentingan seperti pemerintah, sektor publik, serta masyarakat sipil. Pembangunan inklusif dilaksanakan untuk mencapai kebersamaan dengan merangkul masyarakat termasuk disabilitas dan kelompok rentan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka dibutuhkan pembangunan sinergitas kebijakan baik dari internal pemerintah maupun non pemerintah, seperti masyarakat sipil dan swasta untuk dapat memiliki peluang berpartisipasi. Pendekatan model ini akan mencerminkan *sense of inclusive* di era keterbukaan dan demokratisasi dalam setiap proses kebijakan serta kinerja yang dilakukan oleh pemerintah (DG Manar, 2018: 20)

Pembangunan inklusif menjadi jembatan pemerintah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Kota

Semarang sebagai Kota Metropolitan pun tidak terlepas dari peningkatan masalah kemiskinan yang sampai saat ini belum berhasil dituntaskan secara menyeluruh.

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>Presentase</b>
2020	79,58 Ribu	4,34%
2021	84, 45 Ribu	4,56%
2022	79,87 Ribu	4,25%

*Sumber: Data BPS Semarang Kota Tahun 2022*

Meskipun pada tabel penduduk miskin di atas terlihat bahwa jumlahnya tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Jawa Tengah seperti Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Sukoharjo dengan perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Tingkat Kemiskinan 5 Kota-Kota Besar di Jawa Tengah**

<b>Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>
Kota Semarang	4,25%
Salatiga	4, 73%
Sukoharjo	7, 61%
Pekalongan	9,67%
Magelang	11,9%

*Sumber: Data BPS Jawa Tengah Tahun 2022*

Berdasarkan tabel data kota-kota besar yang ada di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada tahun 2021 seperti yang ada di atas, diketahui bahwa Kota Semarang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah.

Idealnya kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah kemiskinan di Kota Semarang. Namun Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Tengah mengungkapkan pada September 2022 terjadi kenaikan penduduk miskin sejumlah 3, 86 juta jiwa yang mana angka tersebut sangat besar dan memunculkan kekhawatiran. Muhammad Saichudin selaku Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Tengah pada siaran persnya menjelaskan terkait persebaran kenaikan penduduk miskin tersebut yang justru terpusat di Kota Semarang sebesar 33, 92 ribu jiwa. Selain itu adanya masalah pada penanganan program Penerima Keluarga Harapan yang justru ditemukan kelalaian yang lebih besar di Kota Semarang pada tabel di bawah:

**Tabel 1. 3 Jumlah Masyarakat Miskin yang tidak tercatat dalam data PKH di Jawa Tengah**

<b>Kota</b>	<b>Data PKH Tidak Tercatat</b>
Kota Semarang	15,23%
Pekalongan	9, 59%
Salatiga	6,02%
Sukoharjo	5,28%
Magelang	4, 26%

*Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2021*

Berdasarkan data yang dipaparkan pada tabel di atas menunjukkan tingkat kelalaian pencatatan masyarakat miskin ke dalam data PKH di Kota Semarang menunjukkan jumlah dengan presentase paling tinggi. Pengentasan kemiskinan memerlukan adanya strategi terpadu, tepat sasaran, dan tepat guna yang dilakukan oleh

pemerintah Kota Semarang sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat. Pemerintah Kota Semarang kemudian membuat inovasi program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, salah satunya masalah kemiskinan melalui program Gerbang Hebat.

Mengingat luasnya jangkauan aspek dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Semarang, terdapat beberapa program yang bekerja sama atau berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* yang terintegrasi dalam Gerbang Hebat, salah satunya program *E-Warong*. Angka kemiskinan yang tinggi tersebut mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Program inovasi yang dibawa oleh Pemkot Semarang dalam menjawab masalah di atas adalah Program Gerbang Hebat. Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, dan Etos Bersama Masyarakat (Gerbang Hebat) dibuat untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Kota Semarang serta kerjasama dari seluruh *stakeholders* karena menyadari bahwa kemiskinan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi saja tetapi juga menyinggung aspek sosial budaya, politik, serta partisipasi masyarakat.

Program GERBANG HEBAT terbentuk pada tahun 2016 yang mencakup komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam rangka penanggulangan kemiskinan masyarakat. Program GERBANG HEBAT merupakan kependekkan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, dan Etos Bersama Masyarakat. Program tersebut

dirancang untuk dapat mewadahi seluruh *stakeholder* yang ada di Kota Semarang dalam mengambil peran untuk mengatasi permasalahan di ranah kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam meningkatkan kualitas rumah tinggal bagi masyarakat miskin. Program tersebut juga berupaya menyediakan prasarana dasar lainnya dengan kualitas yang memadai. Komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung program GERBANG HEBAT ditunjukkan dengan melakukan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Program GERBANG HEBAT tentu berkolaborasi dengan berbagai program-program unggulan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan. Beberapa program yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sakti Peksos, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan program terbaru dari Kementerian Sosial yaitu program *E-Warong* KUBE yang telah diresmikan keberjalanannya di seluruh Indonesia pada tanggal 27 Juni 2016. *E-Warong* merupakan program inovasi Kemensos RI untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai melalui warung-warung yang sistem pembayarannya dilakukan secara elektronik dengan kartu. Melalui program *E-Warong* ini Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk non tunai yang terdiri dari sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa telur, beras, daging, sayur-sayuran, dan tahu tempe.

*E-Warong* juga memiliki tugas untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memberikan nutrisi yang seimbang karena terdapat standar dalam penjualan bahan makanan yang berkualitas premium, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial. Implementasi *E-Warong* diduga dapat terhambat disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Modal usaha yang tidak berkembang;
2. Pengguliran yang dilakukan;
3. Pendapatan;
4. Tabungan yang dimiliki anggota;
5. Jumlah jenis usaha yang dikembangkan,
6. Pengelolaan IKS.

Perkembangan modal, pengguliran dana, peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha yang dikelola masyarakat melalui *E-Warong* merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk memberdayakan ekonomi dan masyarakat PKH. Pemberdayaan ekonomi yang menjadi target utama dari implementasi program *E-Warong* tersebut masih sulit diwujudkan oleh para pelaku *E-Warong* sampai dengan saat ini. *Income Generating* menjadi salah satu perwujudan dari pemberdayaan ekonomi yang komprehensif, holistik dan berkelanjutan dalam pelaksanaan *E-Warong*.

Kemensos RI menyebutkan adanya aspek untuk mewujudkan *income generating*, yaitu apabila terjadi peningkatan pendapatan keluarga, adanya penghasilan yang tetap, kepemilikan atas modal usaha, serta apabila terbentuk kemampuan keluarga untuk mengakses lembaga keuangan yang dilakukan secara berkelanjutan (Kementerian Sosial RI dalam Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), April 2015). Hal tersebut menegaskan bahwa untuk mencapai pemberdayaan ekonomi melalui *Income Generating* diperlukan adanya upaya yang relevan dan konsisten melalui pelaksanaan program *E-Warong*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sariningsih (2017) menunjukkan hasil berupa beberapa kelemahan dalam pelaksanaan *E-Warong*, disebutkan bahwa kelemahan yang ada dalam implementasi *E-Warong* terletak pada dinamika kelompok yang terbentuk dalam pengelolaan *E-Warong*. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh kelompok juga menentukan keberhasilan *E-Warong* karena diketahui bahwa sumber daya manusia pengelola berasal dari penduduk dengan pendidikan yang rendah. Penelitian tersebut juga menjelaskan kelemahan terjadi pada pendamping sosial, produktivitas *E-Warong*, kualitas pangan yang diperjualbelikan, akses permodalan dan pemasaran, juga pada kendala teknis pelaksanaan program (Sariningsih, 2017:33).

*E-Warong* sebagai program inovasi dari Kementerian Sosial RI dalam menyalurkan bantuan sosial berupa bahan pangan kepada peserta PKH. Program ini berintegrasi secara nasional dimana di lingkup daerah khususnya di Kota Semarang, kepengurusannya berada di bawah Dinas Sosial Kota Semarang. Fokus *E-Warong* terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Semarang menjadikannya salah satu

program kerja sama dalam Gerbang Hebat. Komoditas sembako yang ditawarkan juga diperluas dimana semula masyarakat hanya bisa membeli beras dan telur saja, saat ini KPM sudah dapat membeli jagung, beras, telur, ayam, daging, ikan segar, sayur-mayur, buah-buahan dan tahu serta tempe di *E-Warong*. Perluasan komoditas sembako tersebut bertujuan untuk memenuhi sumber karbohidrat, sumber protein, serta sumber vitamin dan mineral KPM sehingga sejalan dengan tujuan pemenuhan nutrisi masyarakat miskin.

Berikut merupakan daftar *E-Warong* di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang:

**Tabel 1. 4**

**Daftar *E-Warong* Kecamatan Semarang Barat**

<b>Nama</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Gotong Royong	Krobokan	Semarang Barat
Lumintu Jaya	Kembangarum	Semarang Barat
Maju Makmur	Gisikdrono	Semarang Barat
Mandiri Jaya	Bojongsalaman	Semarang Barat
Mitra Sejahtera	Ngemplak Simongan	Semarang Barat

*Sumber: Data Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021*

*E-Warong* Mandiri Jaya merupakan 1 dari 5 *E-Warong* yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, tepatnya di Kelurahan Bojongsalaman yang menjadi percontohan *E-Warong* yang beroperasi di Kota Semarang dikarenakan ramainya pelanggan, namun di dalam pelaksanaannya selama 2017 sampai 2023 terdapat penurunan pelanggan seperti yang dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1. 5**

**Jumlah Pelanggan *E-Warong* Mandiri Jaya Tahun 2017-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggan</b>
2017	150 KPM
2018	125 KPM
2019	100 KPM
2020	75 KPM
2021	75 KPM
2023	50 KPM

*Sumber: Analisis pra penelitian*

Penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun ke tahun yang tercantum pada tabel dimulai pada tahun 2017 di awal peresmian *E-Warong* Mandiri Jaya yang terdapat 150 pelanggan yang terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat, kemudian turun sebesar 25 orang menjadi 125 KPM pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 turun lagi sebanyak 25 orang menyisakan 100 pelanggan, pada tahun 2020 dan 2021 jumlah pelanggan stagnan di angka 75, hingga data terbaru pada tahun 2023 hanya menyisakan 50 pelanggan saja. Data tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang mungkin terjadi pada proses pelaksanaan program *E-Warong* Mandiri jaya hingga mengakibatkan dampak penurunan jumlah pelanggan yang drastis.

Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan pada tanggal Jumat, 9 Desember 2023 dengan Ibu Siti selaku Ketua *E-Warong* Mandiri Jaya terdapat beberapa permasalahan yang ditemui sebagai berikut:

1. Masalah ketidaksesuaian antara data dengan kondisi asli yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggota PKH terjadi secara nyata dialami oleh beberapa pelanggan *E-Warong* Mandiri Jaya bahwa “Banyaknya pengurangan kuota penerima bantuan sosial melalui *E-Warong* ini, misal ada penambahan 500 kuota, nanti akan disusul dengan pengurangan kuota, tetapi anehnya anggota yang dipangkas terkadang kenyataannya masih sangat membutuhkan bantuan, sedangkan penerima bansos yang baru dapat dikatakan masih sangat mampu, sehingga kami merasa bahwa tidak ada survey atau koordinasi antara pengelola *E-Warong* dari tingkat bawah ke atas” ungkap Ibu Siti
2. Terdapat perubahan sistem pembayaran yang semula menggunakan kartu BNI per November 2023 dilakukan perubahan pembayaran dengan uang tunai. Di dalam wawancaranya Ibu Siti mengungkapkan “Ada perubahan Mas untuk pembayarannya November kemarin menjadi *cash*, uang bantuannya dikirim melalui kantor POS, tapi kita belum tahu perubahan ini terus menerus atau bulan depan pakai kartu lagi.”

Beberapa masalah di atas tentu menjadi penghambat dalam pelaksanaan program *E-Warong*, terlebih pada masalah perubahan sistem pembayaran menjadi uang tunai atau *cash* hal tersebut tidak sesuai dengan konsep dari *E-Warong* pada awal pembentukannya dimana telah ditetapkan bahwa *E-Warong* akan bersifat elektronik untuk menghindari masalah-masalah lain seperti penyalahgunaan uang yang seharusnya ditukarkan ke bahan pokok untuk keperluan lain.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan *E-Warong* Mandiri Jaya seperti yang telah diungkap di dalam latar belakang oleh peneliti menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan program *E-Warong* Mandiri Jaya yang datang dari beberapa aspek baik aspek internal maupun aspek eksternal seperti kebijakan pemerintah. Peneliti berkeinginan kuat untuk dapat mengangkat topik “Implementasi Program *E-Warong* Mandiri Jaya Semarang” menjadi permasalahan utama di dalam penelitian ini.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berikut perumusan masalah yang dibuat oleh peneliti berlandaskan latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang?.
2. Apa faktor pendorong dan penghambat implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian didasarkan pada perumusan di atas adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Kegunaan penelitian secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan atau wawasan di dalam Administrasi Publik khususnya tentang teori implementasi dan pengetahuan program *E-Warong* lebih lanjut penelitian ini diharapkan mampu menjadi referens bagi perkembangan penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan mampu menjadi rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pelaksana implementasi program *E-Warong* di Kota Semarang serta menjadi kajian evaluasi bagi pelaksanaan program tersebut.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memiliki tema Implementasi Program *E-Warong* Mandiri Jaya Semarang yang dihasilkan dari berbagai referensi melalui penelitian-penelitian terdahulu yang dapat diamati pada tabel di bawah.

**Tabel 1. 6****Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Teori</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Nursaiti dkk (Nursaiti et al., 2022)	Penelitian dengan judul Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program kader pengawas partisipatif di Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.	Teori implementasi program Charles O. Jones	Kualitatif	Hasil riset ini menunjukkan cukup baik bahwasanya relawan kader pengawas partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam memberdayakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat disegi pengawasan.
2	Christianingrum dan Djumiarti (Christianingrum & Djumiarti, 2019)	Penelitian dengan judul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program KOTAKU serta faktor-faktor yang mempengaruhinya	Teori implementasi program David C. Korten	Kualitatif	Kesimpulan dari penelitian ini adalah berjalannya implementasi KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan terdapat capaian penurunan luas pemukiman kumuh dari

No	Peneliti	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
					71,5%.
3	Dwi S. J., Ering Femmy M. G. Tulusan Salmin Dengo (Ering et al., 2019)	Penelitian dengan judul Implementasi Program Job Fair (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon) bertujuan untuk menganalisis implementasi program Job Fair	Teori implementasi Charles O. Jones	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi aplikasi masih terdapat beberapa aspek yang menyebabkan implementasi program Job Fair belum optimal.
4	Rembang dkk (Rembang et al., 2017)	Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	Teori implementasi program Donald P. Warwick	Kualitatif	Hasil penelitian ditinjau dari teori yang di kemukakan yaitu Donald P. Warwick, Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui Program strategis seperti mengadakan event-event (icon) berupa kegiatan Festival danau poso serta mengeksplere pesona objek wisata yang ada di kecamatan pamona puselemba kabupaten poso

No	Peneliti	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
5	Roro Palemanintyas (Pamelanintyas, 2019)	Penelitian dengan judul Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan SPMI yang dilaksanakan di SMPN 8 Yogyakarta	Teori implementasi Charles O. Jones	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan implementasi yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI SMPN 8 Yogyakarta belum maksimal karena masih belum terlaksana pengawasan dan evaluasi yang optimal.
6	Munandar dan Darmawan (Munandar & Darmawan, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat miskin.	Teori implementasi Sumodiningrat	Kualitatif	Berdasarkan penelitian data dan pembahasan hasil yang dilakukan bahwa program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) yang diterapkan mulai Februari 2015, mampu memperbaiki kehidupan Nelayan.
7	Setyanto, D O (Setiyanto, 2023)	Penelitian dengan judul Implementasi Program <i>Skill Development Center</i> Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran di	Teori implementasi program Charles O. Jones	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi program <i>Skill Development Center</i> dalam rangka mengurangi

No	Peneliti	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
		Kota Surakarta bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program <i>skill development center</i> di Kota Surakarta.			pengangguran di Kota Surakarta sudah sesuai pada tahap interpretasi yang ditunjukkan program <i>Skill Development Center</i> sudah bisa dipahami oleh semua <i>stakeholder</i> dan masyarakat, tahap pengorganisasian program belum adanya SOP dan sumber daya berupa dana masih kurang. Sedangkan pada tahap aplikasi yang terdiri dari 3 kegiatan masih terdapat kendala diantaranya sulitnya mencari peserta yang dapat ditempatkan pada pekerjaan formal di Surakarta dan dana yang diberikan masih kurang.
8	Fatonah dkk (Fatonah et al., 2021)	<i>The purpose of this research is to find out and analyze how the implementation of</i>	<i>Theory of implementation program by David. C Korten</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The results of the study explained that the implementation of the Kampus</i>

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Teori</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
		<i>the Kampus Mengajar Program is in the target schools by referring to the theory of implementation of David C. Korten and its relation to literacy, numeracy, technology adaptation, and administration activities in the target schools.</i>			<i>Mengajar Program at SDS Nurani went well.</i>
9	Rizal dan Susilawati (Rizal & Susilahati, 2023)	<i>The purpose of this study was to describe how the implementation of the KLJ program in meeting the basic needs of the elderly.</i>	<i>Theory of implementation program by David. C Korten</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The results showed that the implementation of the program could increase the number of poor elderly people. This is because there is a clear concept of this program and there is strong support from the program implementing elements, both the city government and the community.</i>
10	Ulfa dkk (Ulfa et al., 2021)	<i>The purpose of the study to analyze the implementation of</i>	<i>Theory of implementation program by David. C Korten</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The results showed that the implementation of E-tourism in Aceh Province</i>

No	Peneliti	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
		<i>E-Ticket in Aceh with the factors.</i>			<i>through social media was very influential. This social media is a promotion platform for the region because it is easier, more effective, strategic, and this can increase the regional economic development and the sustainable community in the future.</i>
11	Tarigan dan Laurelia D N (Tarigan, 2022)	<i>The Prisoners' Guidance Program aims to restore inmates' self-esteem and confidence, have skills as a provision for independent living, and can be accepted again by the community after their criminal period is over.</i>	<i>Theory of implementation program by Charles O. Jones</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The results of this study indicate that the implementation of the coaching program at the Class I Rutan Labuhan Deli has been running. Judging from the three indicators, including organization, there is an organizational structure and a clear division of tasks, human resources and infrastructure in the detention center are adequate.</i>

No	Peneliti	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
					<i>Interpretation indicators, communication between the Detention Center and other organizations that support the coaching program are well established, but the socialization activities carried out by the Detention Center are still not optimal.</i>
12	Ariesta Amanda, Thahrina Azriah, dan Lupita Ariantika Sari, 2019 (Amanda et al., n.d.)	<i>This study with the title of Implementation of Standards, Targets, and Implementers at E-Warong KUBE Kenanga Sari in Banyumas Regency aims to analyze how E-Warong of Kenanga Sari encounters the poor problems in the implementation process</i>	<i>Implementation theory by Charles O. Jones</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The results indicated that E-Warong KUBE PKH “Kenanga Sari” has been running in accordance with its objectives.</i>

*Sumber: Analisis Peneliti*

Nursaiti dkk (2022) dengan judul penelitian terdahulu “Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan” menganalisis implementasi program menggunakan teori Charles O. Jones (1996) dan menghasilkan temuan bahwasanya relawan kader pengawas partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam memberdayakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat disegi pengawasan. Penerapan terhadap teori implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996) juga digunakan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi S. J., Ering, Femmy M. G. Tulusan, dan Salmin Dengo (2019), Roro Palemanintyas (2019), Setyanto, D O (2023), Tarigan dan Laurelia D N (2022), dan Ariesta Amanda, Thahrina Azriah, dan Lupita Ariantika Sari (2019). Perbedaan teori di dalam penelitian terdahulu muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh Rembang dkk (2017) yang menganalisis implementasi program pengembangan kawasan pariwisata Danau Poso dengan menggunakan teori implementasi program dari Donald P. Warwick. Perbedaan teori penelitian juga ditemukan pada penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Komunitas Nelayan Tradisional untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang” yang dilakukan oleh Munandar dan Darmawan pada tahun 2020 dengan menggunakan teori implementasi program yang dikemukakan oleh Sumodiningrat. Teori implementasi program oleh David C. Korten ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christianingrum dan Djumiarti (2019), Fatolah dkk (2021), Rizal dan Susilawati (2023), dan Ulfa dkk (2021).

Penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu berperan sebagai pengetahuan serta sumber informasi sekunder bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul “Implementasi Program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang” yang bertujuan untuk menganalisis implementasi serta faktor pendorong dan penghambat yang ada di dalam pelaksanaan program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Fenomena di dalam penelitian ini akan menggambarkan Implementasi Program dan *E-Warong* yang memiliki kesamaan dengan sebagian besar *focus* fenomena penelitian terdahulu namun *locus* penelitian yang dipilih yaitu *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang berbeda secara keseluruhan dengan *locus* yang dibahas oleh penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan teori implementasi program oleh Charles O. Jones (1996) yang terdiri dari dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi sehingga nantinya diharapkan akan menghasilkan deskripsi lengkap mengenai proses implementasi *E-Warong* Mandiri Jaya sehingga penelitian ini akan mampu mengisi kekosongan *locus* penelitian yang belum pernah diteliti terkait implementasi program pada penelitian terdahulu.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Warsono & Marom (2019:17) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan waktu perkembangan antara administrasi publik sebagai ilmu dan administrasi publik sebagai praktik. Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa menjadi asal mula konsep

administrasi sebagai ilmu, sedangkan administrasi sebagai praktik ada bersamaan dengan keberadaan manusia di bumi yang mempraktikkan tindakan administrasi. Administrasi sebagai ilmu mengandung beberapa ketentuan yang bersifat keilmuan, hal ini berkaitan dengan syarat pengetahuan untuk diakui sebagai ilmu yang harus memiliki teori-teori, hukum-hukum, ataupun prinsip-prinsip yang berlaku secara universal.

Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Sodikin (2015:5) menyampaikan lima definisi Administrasi Publik yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Public Administration is cooperative group effort in public setting* (Administrasi Publik merupakan kerjasama kelompok yang terbentuk di dalam lingkup pemerintahan);
- 2) *Public Administration covers all three branches: Executive, legislative and judicial, and their interrelationship* (Administrasi Publik mencakup tihas cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta interaksi antar ketiganya);
- 3) *Public Administration has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process* (Administrasi Publik berperan penting dalam merumuskan kebijakan Negara sehingga diakui menjadi bagian dari proses politik);
- 4) *Public Administration is cosely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community* (Administrasi Publik dekat dengan kelompok baik swasta maupun individu dalam memberikan pelayanan publik);

- 5) *Public Administration is different in significant ways from privat administration* (Administrasi Publik berbeda dengan administrasi privat di dalam beberapa aspek tertentu).

### **1.5.3 Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry di dalam Yeremias (2014:11) membagi paradigma administrasi publik menjadi 5 paradigma, yaitu sebagai berikut.

- 1) Paradigma 1 (1900-1926). Paradigma 1 administrasi publik atau yang dikenal dengan istilah paradigma dikotomi politik dan administrasi dipelopori oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White Goodnow. Paradigma ini memberikan penjelasan bahwa politik harus fokus pada kebijakan yang didasarkan atas aspirasi rakyat. Administrasi memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan yang mencakup aspirasi rakyat tersebut. Pemisahan antara proses politik dan administrasi tersebut diwujudkan pada pemisahan antara lembaga legislatif sebagai jembatan aspirasi rakyat dengan lembaga eksekutif sebagai implementator aspirasi tersebut. Pihak eksekutif bertugas membantu pihak legislatif untuk memformulasikan kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat. Paradigma ini memiliki implikasi bahwa suatu proses administrasi harus dilihat sebagai sebuah proses yang bebas nilai serta ditujukan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomis *government bureaucracy*. Paradigma ini justru cenderung kurang memperhatikan aspek fokus *government bureaucracy* dan menekankan pada lokusnya saja.

- 2) Paradigma 2 (1927-1937). Paradigma 2 administrasi publik disebut dengan istilah paradigma prinsip administrasi yang dipelopori oleh tokoh besar bernama Willoughby, Gullick dan Urwick. Pemikiran paradigma ini tak terlepas dari pemikiran Fayol dan Taylor sebagai tokoh era manajemen klasik. Fokus administrasi publik menurut paradigma ini adalah prinsip administrasi yang meliputi POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang dianggap cocok diterapkan dalam segala konteks apapun. Lokus administrasi publik menurut paradigma ini tidak diungkapkan secara jelas dengan anggapan bahwa prinsip administrasi tersebut dapat berlaku di dalam konteks apapun termasuk organisasi pemerintah.
- 3) Paradigma 3 (1950-1970). Paradigma 3 administrasi publik dikenal dengan istilah Paradigma Administrasi Negara sebagai ilmu politik. Paradigma ini bermula dari keresahan Morstein-Marx, seorang editor buku "*Elements of Public Administration*". Marx berpendapat bahwa proses administrasi dan politik tidak mungkin bisa dipisahkan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Habert Simon yang menjelaskan terkait prinsip administrasi yang tidak dapat berlaku secara global dikarenakan prinsip tersebut tidak konsisten pada praktiknya. Administrasi negara dalam hal ini tidak lagi didefinisikan sebagai suatu hal yang bebas nilai, melainkan selalu dibalut oleh suatu nilai tertentu, artinya akan selalu ada value leden politics pihak lain dalam prosesnya. Teori administrasi publik merupakan teori politik karena pada praktiknya anggapan tentang administrasi publik selalu dipengaruhi oleh nilai tertentu berlaku atau terjadi. Lokus dari paradigma ini adalah birokrasi

pemerintahan. Fokus paradigma ini menjadi tidak jelas karena banyaknya kelemahan pada prinsip administrasi publik.

- 4) Paradigma 4 (1956-1970). Paradigma 4 administrasi publik atau paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi merupakan paradigma pengembangan prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya yang dikemas dalam bentuk lebih ilmiah dan mendalam. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan lain sebagainya. Orientasi dalam perkembangan paradigma ini diarahkan pada 2 hal yakni perkembangan ilmu administrasi murni dengan didukung oleh disiplin ilmu psikologi sosial dan kebijakan publik. Seluruh fokus perkembangan dalam paradigma ini diasumsikan dapat diterapkan dalam administrasi bisnis maupun administrasi publik.
- 5) Paradigma 5 (1970-sekarang). Paradigma 5 administrasi publik dikenal dengan paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik. Fokus dan lokus dalam paradigma ini jelas. Fokus paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah publik dan kepentingan publik
- 6) Paradigma 6. Administrasi publik dikenal dengan istilah administrasi publik baru atau governance. Paradigma ini merupakan paradigma tambahan yang dikemukakan oleh George Frederickson disamping lima paradigma administrasi publik Nicholas Henry. Paradigma administrasi publik baru memiliki fokus pengorganisasian, penggambaran, dan pendesaian organisasi agar mampu berjalan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan secara maksimal dengan

pengembangan sistem desentralisasi, partisipasi, demokratis, responsif dan merata dalam upaya pemenuhan layanan publik. Paradigma ini memiliki ciri khas yakni menolak anggapan bahwa administrasi bersifat *value free*, karena dalam paradigma ini, nilai yang dibahas seringkali menimbulkan pertentangan antara satu dengan lainnya. Titik permasalahannya adalah hal yang harus dilakukan dalam upaya mendorong terciptanya nilai tersebut (Karyana, 2014:34).

Implementasi program *E-Warong Mandiri Jaya* Semarang dapat dikategorikan ke dalam paradigma publik baru atau *governance* sejalan dengan fokus dari paradigma administrasi publik baru, yakni mencakup usaha dalam hal pengorganisasian, penggambaran, dan pendesaianan organisasi agar dapat berjalan dengan mewujudkan nilai kemanusiaan secara optimal melalui pengembangan sistem desentralisasi yang memungkinkan terjadinya responsivitas, partisipasi, demokrasi dan pelayanan yang merata kepada masyarakat.

### **1.5.5 Implementasi Program**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi diartikan juga sebagai penerapan, pelaksanaan, ataupun pemenuhan. Charles O. Jones (1996: 295) mengemukakan pendapatnya bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Program mempermudah pengoperasionalisasian dari sebuah rencana yang akan tersusun dengan lebih

terorganisir. Konsep implementasi program menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan serangkaian usaha yang dilakukan atau dilaksanakan untuk mewujudkan rancangan. Rohman (2009: 101-102) menjelaskan bahwa implementasi program menjadi suatu komponen yang terdapat di dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga pelaksanaan agar tersistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

Salah satu model dari implementasi program adalah yang diungkapkan oleh David C. Korten (dalam Akib dan Tarigan 2000: 12) di mana program dinilai berdasarkan model kesesuaian implementasi dengan program tersebut. Korten menggambarkan model kesesuaian program sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara program dan pemanfaatan

Korten menegaskan bahwa dalam menilai keberhasilan harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian yang dimaksud terjadi antara program yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan yang ada pada kelompok yang ditargetkan akan menerima manfaat. Aspek kesesuaian program dilihat dari adanya tujuan yang jelas untuk menuntun program mencapai tujuan, adanya rancangan anggaran yang mendukung tercapainya pelaksanaan program, adanya strategi yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan program serta mencapai tujuan program. Kolaborasi aspek yang terdiri dari aspek tujuan, strategi, serta rancangan anggaran akan menunjukkan apakah terjadi kesesuaian antara program dengan pemanfaatan.

## 2. Kesesuaian program dengan pelaksana

Kesesuaian menunjukkan konsistensi antara program yang dilaksanakan dan organisasi yang melaksanakan atau mengimplementasikannya. Kondisi ini berarti bahwa tugas yang diberikan oleh program harus sebanding dengan kemampuan organisasi pelaksana program. Organisasi pelaksana atau disebut juga sebagai implementor program dikategorikan sebagai SDM yang kinerjanya mempengaruhi keberhasilan program. Aspek-aspek yang mempengaruhi sikap dan pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan disebutkan terdiri dari pemahaman dan pengetahuan pelaksana dalam memberikan pelayanan. Aspek kesesuaian program dengan pelaksana berkaitan dengan kognisi atau pemahaman dan pendalaman terhadap program yang akan dijalankan. Pemahaman berhubungan dengan maksud dari tujuan yang telah dirancang. Pemahaman atas tujuan menjadi penting karena apabila implementor program tidak memahami tujuan maka bisa jadi menghasilkan implementasi yang gagal. Pemahaman juga berlaku pada aspek pemberian layanan, pengoperasian layanan, serta pemberian kualitas layanan yang terbaik. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana menjadi aspek terakhir yang diperhatikan dalam mewujudkan kesesuaian antara program dan organisasi yang menjadi implementor program.

## 3. Kesesuaian antara pelaksana dengan penerima manfaat

Korten turut menyebutkan harus ada kesesuaian antara syarat dari pelaksana untuk dapat menghasilkan keluaran atau dampak program yang sesuai dengan kebutuhan

kelompok sasaran. Kedua kelompok ini harus menghasilkan kesesuaian target yang akan dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, Korten menegaskan bahwa implementasi program berintikan kepada tiga elemen, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, serta kelompok sasaran program. Apabila telah terjadi kesesuaian dari tiga model implementasi yang dikemukakan di atas, Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program, Korten menyatakan bahwa implementasi dari suatu program tersebut dapat dinilai berhasil.

Pelaksanaan sebuah program membutuhkan peran serta aspek implementasi sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program ditentukan oleh implementasinya. Implementasi program terdiri dari langkah-langkah pelaksanaan kegiatan harus dilakukan untuk mencapai tujuan (Alfiah, 2019: 26). Menurut Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023: 44) berpendapat lain tentang implementasi program bahwa terdapat tiga dimensi di dalam aktivitas atau pengoperasian program, yaitu:

1. Dimensi organisasi, implementor dalam menyelenggarakan implementasi program harus mempunyai tugas pokok serta fungsi yang jelas tentang tujuan implementasi dari suatu program yang akan dicapai. Implementor juga harus mempunyai struktur organisasi serta visi misi yang telah sesuai dengan program. Kejelasan dari struktur organisasi pelaksana diperlukan dalam pengoperasian program supaya dapat terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki oleh program tersebut.
2. Dimensi interpretasi, implementor melaksanakan program sebagaimana harapan dan tujuan yang telah direncanakan terhadap keberjalanan program yang sedang diupayakan. Kemampuan antar implementor dalam melaksanakan program akan menentukan tingkat keberhasilannya.
3. Dimensi aplikasi (penerapan), dimensi ini bergantung pada kemampuan implementor dalam melaksanakan program secara aplikatif di lapangan atau kepada masyarakat melalui perwujudan pelayanan, pembayaran, kemudahan, serta pengawasan. Dimensi aplikasi ini juga dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan program tidak bersinggungan atau berbenturan dengan pelaksanaan program lain.

Dimensi-dimensi implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023: 44) diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

### **a. Dimensi Organisasi**

Dimensi organisasi atau lembaga menjadi satu komponen yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan implementasi. Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023: 44) berpendapat bahwa dimensi organisasi berkaitan dengan penataan sumber daya, unit atau lembaga, serta metode yang berguna bagi keberjalanan implementasi program.

Organisasi dikategorikan oleh Wahab (dalam Nurhayati, 2013: 30) dengan ciri-ciri utama sebagai berikut:

- 1) *A hierarchical structure involving delegations of authority from the top to the bottom of an organization* hal tersebut memiliki arti bahwa organisasi berkaitan erat dengan keberadaan hierarki yang kemudian diikuti oleh adanya aliran wewenang dari arah atas ke bawah dari struktur organisasi;
- 2) *A series of official positions or offices, each having prescribed duties and responsibilities* yang memiliki arti bahwa organisasi berkaitan dengan pengisian posisi atau jabatan dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- 3) *Formal rules, regulations and standard governing operations of the organization and behavior of its member* yang memiliki arti bahwa organisasi berkaitan dengan peraturan, standar, atau prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi aspek yang mengatur sistem kerja dan perilaku anggota;

- 4) *Technically qualified personel employed on career basis with promotion based on qualifications and performance*, yang memiliki arti bahwa organisasi berkaitan dengan sumber daya manusia yang menjadi penggerak formal dari sebuah organisasi dengan kualifikasi atau kriteria tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas, ditemukan adanya aspek di dalam dimensi organisasi yang harus memiliki aturan yang jelas untuk menghilangkan adanya ketimpangtindihan atau *overlapping* dalam melaksanakan tugas dan fungsi di dalam organisasi tersebut. Penataan ulang sumber daya organisasi, kejelasan prosedur atau aturan, wewenang yang cukup menjadi aspek yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi untuk dapat melaksanakan implementasi yang baik.

#### **b. Dimensi Interpretasi**

Saefullah (dalam Natari et al., 2018: 14) memberikan pendapat bahwa hal yang terpenting di dalam keberlangsungan pelaksanaan sebuah program adalah adanya pemahaman yang sama dari semua pihak yang memiliki peran atau terlibat di dalam implementasi program dan memahami tugas dan fungsinya dengan penuh kesadaran, oleh karena itu sangat diperlukan pengertian yang sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Pendapat tersebut memberikan penegasan bahwa jika masih ditemukan adanya ketidaksepahaman antara implementor atau pelaksana dengan penerima manfaat dari program atau kebijakan, maka implementasi yang baik akan sulit diwujudkan.

Dimensi interpretasi memiliki aspek kejelasan tugas dan fungsi serta adanya skala prioritas yang dapat digunakan sebagai rambu-rambu pengukuran ketercapaian tujuan yang pasti. Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023: 44) sekaligus memberikan pendapatnya mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, yaitu bahwa hal-hal mudah dikendalikan, hal-hal yang dikaitkan dengan undang-undang, serta statute yang memberi dampak pada pelaksana. Hal-hal yang mudah dikendalikan dipengaruhi oleh faktor tingkah laku kelompok, ukuran kelompok, serta adanya perubahan tingkah laku kelompok. Hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang terdiri dari faktor tujuan yang konsisten, ketentuan dari peraturan, dana yang cukup, serta komitmen pelaksana.

### **c. Dimensi Aplikasi**

Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023: 44) berpendapat bahwa aplikasi adalah ketentuan yang memiliki sifat yang tetap untuk dapat diterapkan sebagai alat pencapaian tujuan atau sasaran program. Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui respon penerima manfaat yang dalam hal ini adalah Penerima Keluarga Harapan atau PKH di Kecamatan Bojongsalaman yang menerima atau menolak adanya penyaluran bantuan sosial non tunai melalui *E-Warong* Mandiri Jaya. Ditemukan adanya dimensi aplikasi yang terdiri dari penilaian atas keberhasilan program, prinsip kualitas, pengawasan terhadap program, serta evaluasi.

Donald P. Warwick dalam bukunya Syukur Abdullah (2011;17) mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*Impeding conditions*). Syukur Abdullah (2011: 398) mengungkapkan terkait faktor-faktor yang memiliki pengaruh dan dapat berperan sebagai pendorong atau penghambat implementasi program yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Faktor lingkungan, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang ada di sekitar keberjalanan implementasi program sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap proses-proses pelaksanaan program tersebut.
2. Target grup atau kelompok sasaran implementasi program yang direncanakan atau telah diharapkan menjadi kelompok penerima manfaat dari pelaksanaan suatu program. Sikap dari penerima manfaat juga menjadi fokus perhatian dari aspek faktor target grup.
3. Program atau kebijakan lain beserta regulasinya yang dilaksanakan bersamaan dengan program yang berkaitan.
4. Unsur perencanaan atau implementasi yang menyangkut baik perseorangan atau juga organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di dalam pengelolaan, pelaksanaan, serta pengawasan dari implementasi program.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nursaiti (2022: 230) mengemukakan terkait faktor pendorong dalam dimensi organisasi yang dapat terjadi terkait kelengkapan sarana prasarana atau fasilitas dapat menunjang keberhasilan

implementasi program. Faktor pendorong keberhasilan pada dimensi aplikasi dijelaskan berasal dari pelaksanaan pengawasan atau pelatihan yang dilakukan untuk menunjang kemampuan implementor. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rembang dkk (2017: 6) terkait faktor pendorong dan penghambat merumuskan dapat berasal dari komitmen implementor program, banyaknya aktor yang terlibat, pemimpin politik, serta kemampuan organisasi.

Berdasarkan teori implementasi program yang dikemukakan oleh David C. Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2000: 12) yang meninjau implementasi program berdasarkan kesesuaian dengan pemanfaatan, pelaksana, serta penerima manfaat, serta Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023: 44) yang meninjau implementasi program melalui dimensi organisasi, dimensi interpretasi, dan dimensi aplikasi. Implementasi program E-Warong Mandiri Jaya di dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023: 44) didukung dengan dimensi-dimensi organisasi untuk mengetahui kematangan pelaksanaan program dari pihak pengelola E-Warong Mandiri Jaya, dimensi interpretasi yang melingkupi aspek pemahaman atas kejelasan program karena ditemukan adanya ketidaksesuaian tujuan serta fungsi penyaluran bantuan sosial non tunai melalui *E-Warong* Mandiri Jaya dengan masalah yang terjadi di lapangan. Dimensi implementasi selanjutnya yang menjadi modal analisis peneliti adalah dimensi aplikasi, dalam hal ini aplikasi atau penerapan program *E-Warong* Mandiri Jaya akan dinilai keberhasilannya berdasarkan kesesuaian mutu yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. analisis terhadap faktor

pendorong dan penghambat implementasi program mengelaborasi penelitian terdahulu oleh Syukur Abdullah (2011: 398) dan Nursaiti (2022: 230) untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang.

### **1.5.6 *E-Warong***

*E-Warong* adalah program kementerian sosial yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan di setiap daerah dengan memberikan bantuan penyokong makanan berupa sembako. *E-Warong* merupakan langkah terbaru dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan dengan tema program “Keluarga Harapan” (PKH). *E-Warong* menjadi strategi bisnis yang dikembangkan kelompok usaha masyarakat dalam bidang perdagangan sebagai strategi untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Tugas dari anggota yang mengelola *E-Warong* adalah melakukan pembayaran dengan uang elektronik, menyiapkan bahan baku sembako, kebutuhan usaha, dan pemasaran hasil produksi. Pengelolaan *E-Warong* dilakukan secara gotong-royong oleh masyarakat yang juga tergabung sebagai penerima manfaat. (Kementrian Sosial RI, 2017:30).

*E-Warong* merupakan warung sembako biasa namun dalam proses transaksinya berbeda. Pembayaran yang dilakukan oleh PKH dilakukan dengan uang elektronik yang terdapat di dalam kartu yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Masyarakat yang menerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan secara non-tunai dengan cara dana bantuan tersebut dikirim kepada rekening masing-

masing bagi penerima manfaat. Kartu pembayaran tersebut dikeluarkan oleh Bank BNI sebagai Bank penyalur *E-Warong* di Kota Semarang. Dalam transaksi non tunai *E-Warong* menggunakan jaringan internet karena dalam transaksi yang digunakan tersebut menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Fungsi *E-Warong* Kube dapat melayani 4 hal yaitu:

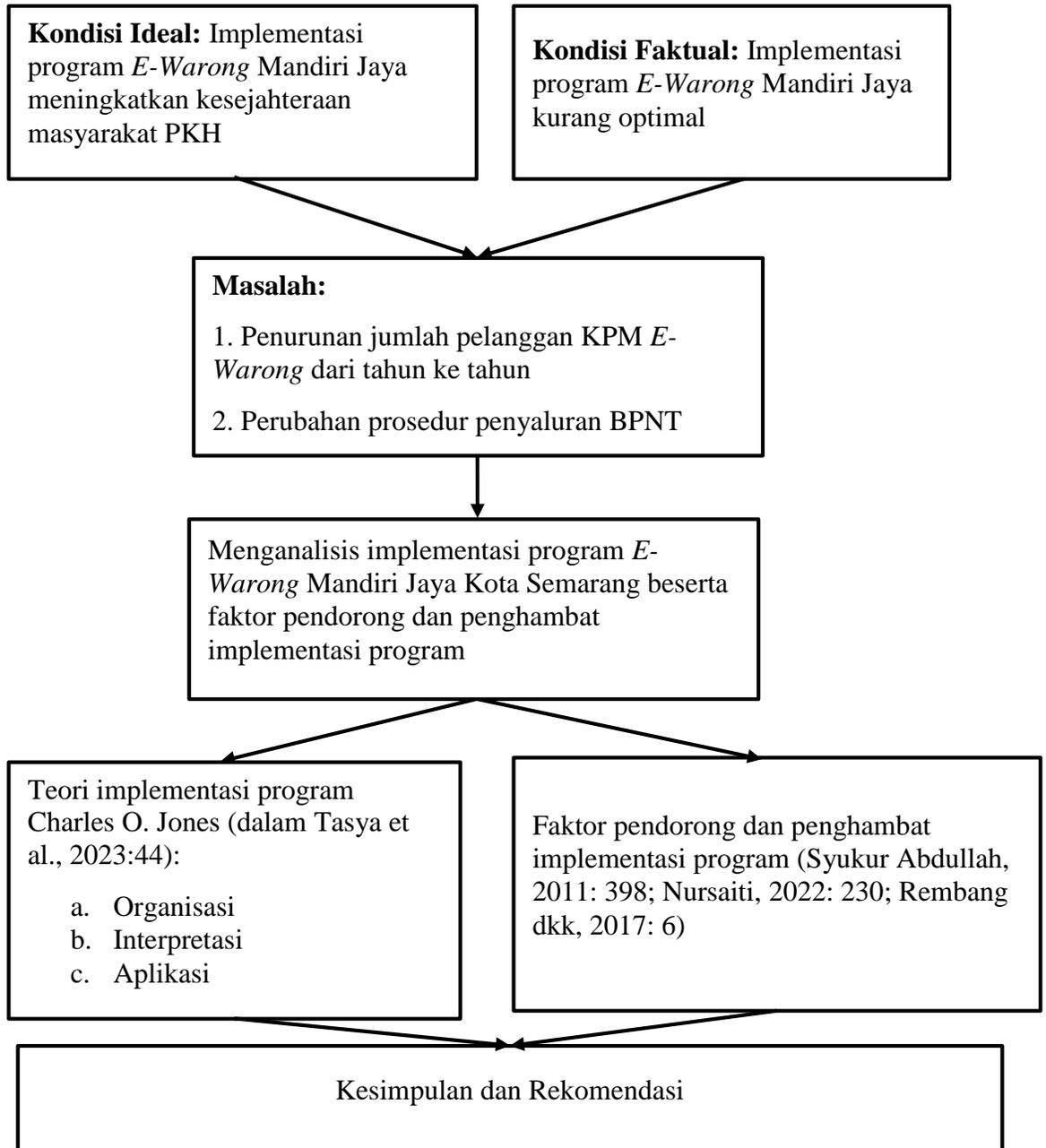
- 1) Pelayanan jasa pencairan bantuan sosial non-tunai,
- 2) Penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok warga masyarakat miskin lingkungan sekitar,
- 3) Pemasaran hasil produksi penerima bantuan,
- 4) Penarikan bantuan sosial secara non tunai oleh penerima manfaat (Kemensos RI, 2017:12).

Elektronik warung gotong-royong (*E-Warong*) menerima total dana bantuan sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai modal usaha dan modal kerja. Uang tersebut bisa digunakan untuk pemanfaat bantuan permodalan seperti pembelian bahan pangan pokok dan modal kerja pendukung usaha sesuai dengan prioritas seperti: listrik, layanan internet, timbangan dan lain-lain. Bantuan sosial sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dapat digunakan untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang. Pengelolaan *E-Warong* melibatkan 10 anggota dengan 1 orang pendamping/penyelia. Dasar hukum pelaksanaan *E-Warong* adalah sebagai berikut:

- 1) UU No.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Perpres No.82/Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
- 3) Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT).
- 4) Arahan Presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, 19 Juli 2017.

Implementasi *E-Warong* Mandiri Jaya di dalam penelitian ini akan melihat penerapan program melalui penilaian atas aspek organisasi yang dimiliki oleh pengelola *E-Warong* Mandiri Jaya, interpretasi atau kesamaan pandangan atas tugas dan fungsi *E-Warong* Mandiri Jaya dalam hal (1) Pelayanan jasa pencairan bantuan sosial non-tunai, (2) Penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok warga masyarakat miskin lingkungan sekitar, (3) Pemasaran hasil produksi penerima bantuan, (4) Penarikan bantuan sosial secara non tunai oleh penerima manfaat, serta melihat penerapan atau aplikasi *E-Warong* Mandiri Jaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut untuk mengetahui respon yang diberikan oleh PKH di Kecamatan Bojongsalaman.

**Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Peneliti**



*Sumber: Analisis Peneliti*

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan teori implementasi program yang dikemukakan oleh (David C. Korten (dalam Akib dan Tarigan 2000: 12); Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023: 44)), penelitian ini akan menganalisis implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya menggunakan teori implementasi program Charles O. Jones (dalam Tasya et al., 2023:44) yang terdiri dari dimensi organisasi, dimensi interpretasi, dan dimensi aplikasi sebagai alat analisis untuk dapat mengetahui keberjalanan implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang. Fenomena tersebut dipilih untuk membantuk peneliti menganalisis implementasi melalui kejelasan tujuan dan sasaran dari program *E-Warong* sehingga dapat diketahui kesesuaian implementasi terhadap dampak yang direncanakan untuk mengukur korelasi hasil pelaksanaan *E-Warong* Mandiri Jaya dengan tujuan dan sasaran program *E-Warong* yang telah dirumuskan oleh pemerintah, yaitu untuk mengembangkan kemampuan masyarakat miskin atau PKH dalam meningkatkan taraf hidup melalui pengelolaan bisnis *E-Warong* Mandiri Jaya yang bertugas menyalurkan bantuan non tunai kepada sesama masyarakat PKH di Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kecocokan juga ditemukan antara fakta di lapangan dengan fenomena implementasi bahwa ditemukan adanya organisasi yaitu pengelola *E-Warong* Mandiri Jaya yang menjadi kunci keberhasilan implementasi program *E-Warong* tersebut.

Fenomena penelitian akan diamati berdasarkan aspek-aspek yang telah dirumuskan di dalam setiap dimensi implementasi program Charles O. Jones, sebagai berikut:

1. Dimensi Organisasi akan diamati melalui:
  - a. Tupoksi organisasi *E-Warong* Mandiri Jaya;
  - b. Bentuk, anggota, dan kompetensi pengelola *E-Warong* Mandiri Jaya;
  - c. Standar, sasaran, dan prosedur *E-Warong* Mandiri Jaya yang dirancang oleh Dinas Sosial Kota Semarang;
  - d. Fasilitas pendukung pelaksanaan *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang.
2. Dimensi Interpretasi akan diamati melalui:
  - a. Konsistensi pelaksanaan standar, sasaran, dan prosedur program *E-Warong* Mandiri Jaya, dan
  - b. Komitmen pengelola dalam melaksanakan program *E-Warong* Mandiri Jaya.
3. Dimensi Aplikasi (penerapan) akan diamati melalui:
  - a. Kegiatan pelayanan dan pembayaran penyaluran BPNT di *E-Warong* Mandiri Jaya;
  - b. Ketercapaian pelaksanaan standar, sasaran, prosedur, dan manfaat *E-Warong* Mandiri Jaya;
  - c. Pengawasan keberjalanan program *E-Warong* Mandiri Jaya
  - d. Evaluasi program *E-Warong* Mandiri Jaya.

Mengingat bahwa tidak ada implementasi yang berjalan sempurna maka peneliti akan melakukan pengamatan dan analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang menggunakan elaborasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syukur Abdullah (2011: 398), Nursaiti (2022: 230), dan Rembang dkk (2017: 6). Hasil temuan tersebut akan dianalisis untuk dapat menggambarkan fenomena kedua dalam penelitian ini terkait faktor pendorong dan penghambat implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya yang akan diamati berdasarkan aspek berikut:

1. Kondisi sosial politik yang mempengaruhi stabilitas implementasi *E-Warong* Mandiri Jaya
2. Sikap kelompok sasaran yang terdiri dari PKH
3. Regulasi yang mengganggu kelancaran implementasi program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang
4. Pengawasan program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang
5. Kelengkapan fasilitas program *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang

**Tabel 1. 7 Operasionalisasi Konsep**

Fenomena Penelitian	Dimensi	Aspek yang Diamati
<b>Implementasi program E-Warong Mandiri Jaya Kota Semarang</b>	a. Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tupoksi organisasi <i>E-Warong Mandiri Jaya</i>;</li> <li>2. Struktur, peran, dan kompetensi pengelola <i>E-Warong Mandiri Jaya</i>;</li> <li>3. Standar, sasaran, dan prosedur <i>E-Warong Mandiri Jaya</i> yang dirancang oleh Dinas Sosial Kota Semarang.</li> <li>4. Fasilitas yang dimiliki untuk melaksanakan program.</li> </ol>
	b. Interpretasi (pemahaman)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsistensi pelaksanaan standar, sasaran, dan prosedur program <i>E-Warong Mandiri Jaya</i>, dan</li> <li>2. Komitmen pengelola dalam melaksanakan program <i>E-Warong Mandiri Jaya</i>.</li> </ol>
	c. Aplikasi (penerapan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pelayanan dan pembayaran BPNT;</li> <li>2. Ketercapaian manfaat program <i>E-Warong Mandiri Jaya</i>;</li> <li>3. Pengawasan program <i>E-Warong Mandiri Jaya</i>;</li> <li>4. Evaluasi program <i>E-Warong Mandiri Jaya</i>.</li> </ol>
<b>Faktor pendorong dan penghambat implementasi program</b>	a. Faktor pendorong dan penghambat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi sosial politik yang mempengaruhi stabilitas implementasi <i>E-Warong Mandiri Jaya</i></li> </ol>

Fenomena Penelitian	Dimensi	Aspek yang Diamati
<b><i>E-Warong Mandiri Jaya Kota Semarang</i></b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sikap kelompok sasaran yang terdiri dari PKH</li> <li>3. Regulasi yang mengganggu kelancaran implementasi program E-Warong Mandiri Jaya Kota Semarang</li> <li>4. Pengawasan program E-Warong Mandiri Jaya Kota Semarang</li> <li>5. Kelengkapan fasilitas program E-Warong Mandiri Jaya Kota Semarang</li> </ol>

*Sumber: Analisis Peneliti*

Fenomena yang akan diamati di dalam penelitian ini terdiri dari implementasi program *E-Warong Mandiri Jaya* yang akan dianalisis menggunakan teori implementasi program dari Charles O. Jones 1996 dengan melihat tiga dimensi, yaitu dimensi organisasi, dimensi interpretasi, dan dimensi aplikasi. Fenomena terkait faktor pendorong dan penghambat implementasi program dianalisis menggunakan hasil elaborasi dari hasil penelitian terdahulu terkait faktor pendorong dan penghambat implementasi program oleh Syukur Abdullah (2011: 398), Nursaiti (2022: 230) dan Rembang dkk (2017: 6).

## 1.7 Argumentasi Penelitian

Pembangunan inklusif merupakan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan secara adil terhadap seluruh warga negara. Pembangunan inklusif dijadikan sebagai jembatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Skema yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial RI. Program ini disebut Program Elektronik Warong yang bertujuan sebagai penyalur BPNT kepada masyarakat kurang mampu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program *E-Warong* ini melibatkan bank yang bekerja sama sebagai lembaga yang memfasilitasi sarana dalam bentuk transaksi digital. Pelaksanaan program *E-Warong* juga melibatkan pihak swasta yang berperan sebagai pemasok bahan pokok. Program *E-Warong* ini tercatat sebagai program nasional tetapi lokus pelaksanaan *E-Warong* tetap berada di daerah (kota/kabupaten).

*E-Warong* berfungsi menyalurkan BPNT, awalnya BPNT ini bernama Raskin kemudian berubah menjadi Rastra hingga saat ini bernama BPNT. Di Kota Semarang terdapat 60 *E-Warong* sejak diluncurkan pada 20 Agustus 2016, di Kelurahan Ngadirejo, Mijen. Pihak yang terlibat di dalam keberjalanan program *E-Warong* di Kota Semarang yaitu Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kota Semarang, BNI Kanwil Semarang, Bulog, Pemasok Bahan Pokok yang diserahkan kepada setiap *E-Warong*. Pemerintah membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan dimana di dalam tim koordinasi terdapat walikota sebagai

penanggung jawab bantuan sosial, ketua koordinasi yaitu sekda, sekretaris merupakan Dinas Sosial, Bappeda sebagai bidang perencanaan dan bidang pengawasan yaitu Inspektorat, Polrestabes, Dandim. Kemudian Pendamping Sosial yang merupakan Unit Pelaksana PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), TPFM (Tim Penjangkauan Fakir Miskin), serta Kube Jasa

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian merupakan hal yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2012:15) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, metode ini meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks,

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini

menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan cirri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah:

- 1) Alamiah,
- 2) Data bersifat deskriptif bukan angka-angka,
- 3) Analisis data dengan induktif, dan
- 4) Makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

## **1.8.2 Situs Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek berlangsungnya penelitian. Lokasi yang diambil pada penelitian ini ada di Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi ini diambil untuk mengetahui Implementasi *E-Warong* Mandiri Jaya, karena *E-Warong* Mandiri Jaya memiliki pengelolaan implementasi program yang baik serta memiliki pelanggan dan

penghasilan yang berkelanjutan dibandingkan dengan *E-Warong* lain di Kecamatan Semarang Barat.

#### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan terhitung sejak Desember 2022 dan berakhir pada Maret 2023.

#### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pengelola program *E-Warong* Mandiri Jaya yang bertugas untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai serta berasal dari Keluarga Penerima Manfaat.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Data memiliki peranan yang penting untuk membantu peneliti menarik kesimpulan penelitian. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Penggambaran data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: *stakeholder* yang terlibat, keberjalanan subjek dan objek penelitian, hingga pelaksanaan program *E-Warong* Kota Semarang.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data penelitian didapatkan dari dua jenis sumber data (data primer dan data sekunder). Sumber data primer didapat dari hasil wawancara dan observasi yang

dilakukan oleh penulis dengan Dinas Sosial Kota Semarang, agen *E-Warong* Mandiri Jaya, atau instansi lain yang terkait. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari hasil studi pustaka melalui jurnal atau penelitian terdahulu.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan proses percakapan dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan di dalam *interview guide* dan pihak narasumber sebagai pihak yang memiliki sumber data yang sedang dicari oleh peneliti. Wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang guna memperoleh profil persebaran *E-Warong* Kube-PKH serta data lain yang diperlukan. Peneliti juga akan mengadakan wawancara dengan agen *E-Warong* Mandiri Jaya serta instansi dan aktor-aktor lain yang terkait.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa pengamatan sekaligus pencatatan sistematis pada data lapangan. Peneliti melakukan observasi pada agen *E-Warong* Mandiri Jaya. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa persebaran agen, *stakeholders* terkait, kondisi fisik *E-Warong* Mandiri Jaya, serta persebaran sarana dan prasarana program *E-Warong* Kube-PKH Kota Semarang.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder melalui dokumentasi, transkrip, catatan, penelitian terdahulu, hingga jurnal terkait dengan topik penelitian yang telah ditentukan penulis.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan keadaan berbentuk kalimat, kemudian dikategorikan menjadi kesimpulan yang bersifat deskripsi. Proses analisis data dimulai dengan menganalisis seluruh data yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan atau observasi, transkrip, dokumen, dan foto-foto yang berkaitan dengan *E-Warong* Mandiri Jaya. Setelah dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah pemilihan data dengan memfokuskan, merangkum, menyederhanakan hal-hal yang penting, serta membuang data yang tidak digunakan untuk memperoleh hasil yang runtut dan jelas.

Setelah melakukan reduksi, langkah berikutnya yaitu penyajian data. Data yang telah terkumpul disajikan melalui penguraian data secara singkat seperti dengan menggunakan bagan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu berupa teks yang naratif dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman. Tahap selanjutnya membuat gambaran kerja yang jelas berdasarkan seluruh analisa yang telah dimengerti. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan hasil dari observasi, wawancara, dokumentasi, serta deskripsi kondisi *E-Warong* Mandiri Jaya untuk mendeskripsikan hasil data dan mengambil sebuah kesimpulan.

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan verifikasi setelah melakukan pemilihan dan penyusunan data. Tahap terakhir ini dilakukan dengan membuat simpulan yang dapat memberikan gambaran dari objek yang diteliti agar semakin jelas. Kesimpulan diambil berdasarkan data yang sudah diolah pada proses sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui output atau jawaban hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan harus memuat gambaran secara jelas, sistematis, ringkas, dan akurat hingga mudah dipahami mengenai implementasi Program *E-Warong* Mandiri Jaya.

#### **1.8.8 Kualitas Data**

Uji data di dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi sumber. Data yang diperoleh akan diolah dan dielaborasi melalui observasi dan wawancara dan dibandingkan dengan perolehan data dari masing-masing informan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Keseluruhan dan ketepatan penggunaan metode
  - 1) Bagaimana subjek/partisipan dan setting sosial penelitian bisa diakses?
  - 2) Siapa yang diobservasi dan diinterview?
  - 3) Berapa kali observasi dilakukan?
  - 4) Berapa lama dilakukan?
  - 5) Apa saja pertanyaan yang diajukan pada saat interview?
  - 6) Apa saja tujuan observasi?
  - 7) Dokumen atau catatan apa saja yang diperlukan dan dikaji?

8) Bagaimana mengkajinya?

9) Bagaimana pengumpulan data dilakukan?

b) *Credibility*

Kredibilitas dibuktikan dengan melakukan publikasi yang dalam hal ini keribilitas dapat daya peroleh dari presentasi hasil penelitian pada tahap siding.

c) *Relevance* (kegunaan temuan)

Proses selanjutnya adalah peneliti harus mengethau dengan jelas kegunaan atau manfaat serta temuan baru di dalam penelitian yang dibuatnya.